

PROGRAM PINJAMAN MODAL TANPA RIBA YAYASAN BAITUL MALL PLN DI LERENG MERAPI MERBABU

Suryanto¹ Urip Budiarto² Abdu Rahman Wijaya³

^{1,2,3}Islamic Economics and Finance

Universitas Trisakti, Jakarta

Email : qishoshulhaq07@gmail.com: ubudiarto67@gmail.com

ABSTRAK

Orang yang tidak memiliki modal dan aset sangat mengharapkan pinjaman tanpa bunga. Namun, hampir tidak mungkin lembaga keuangan mengucurkan pinjaman tanpa bunga. Mereka akhirnya menjadi terjerat dalam pinjaman lintah darat untuk mendapatkan sebuah modal pinjaman yang mana hal itu menyebabkan mereka hidup di dalam riba selama bertahun-tahun. Inilah latar belakang *Yayasan Baitul Maal* (YBM) PLN hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu dengan meluncurkan *Program Pemberdayaan Ekonomi Umat* (PPEU) dengan bentuk berupa pinjaman modal pertanian tanpa riba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan menilai dampak dari Program Pemberdayaan Ekonomi Umat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui pengisian kuisioner oleh 83 penerima manfaat dan metode kualitatif melalui wawancara dan *Focuss Grup Discussions* (FGD). Dampak dari program dievaluasi dengan ukuran *Sustainable Livelihood Impact Assessment* (SLIA) dan *Most Significant Change* (MSC). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerima manfaat merasa sangat puas dengan program "**Pinjaman Modal Tanpa Riba**" dengan rata-rata skor penerimaan 86%. Sementara itu, hasil evaluasi berdasarkan 5 aspek SLIA adalah sebagai berikut: Aspek ekonomi meningkat sebesar 0.5, aspek sosial meningkat sebesar 0.6, aspek dakwah naik sebesar 2.0, aspek spiritual naik sebesar 1.4, dan aspek sumber daya manusia meningkat sebesar 0.8. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi para pemangku kepentingan terkait dalam rangka untuk mengoptimalkan program peningkatan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: program pemberdayaan ekonomi, pinjaman modal, baitul maal

ABSTRACT

People who do not have capital and assets really hope for interest-free loans. However, it is almost impossible for financial institutions to disburse interest-free loans. They eventually became entangled in loan sharks to obtain loan capital, which caused them to live in usury for years. This is the background to the PLN Baitul Maal

(YBM) Foundation being present in the community through the Merapi Merbabu Community Islamic Boarding School by launching the People's Economic Empowerment Program (PPEU) in the form of usury-free agricultural capital loans. The aim of this research is to determine and assess the impact of the Community Economic Empowerment Program. This research uses quantitative methods by filling out questionnaires by 83 beneficiaries and qualitative methods through interviews and Focus Group Discussions (FGD). The impact of the program is evaluated using the Sustainable Livelihood Impact Assessment (SLIA) and Most Significant Change (MSC) measures. The results of this research show that the beneficiaries are very satisfied with the "Capital Loans Without Usury" program with an average acceptance score of 86%. Meanwhile, the evaluation results based on the 5 SLIA aspects are as follows: Economic aspects increased by 0.5, social aspects increased by 0.5 0.6, the da'wah aspect increased by 2.0, the spiritual aspect increased by 1.4, and the human resources aspect increased by 0.8. It is hoped that the results of this research can become recommendations for relevant stakeholders in order to optimize community economic improvement programs.

Keywords: Economic Empowerment Program, Capital loan, Baitul Maal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu wilayah pusat bencana karena letak geografisnya yang berada di tempat pertemuan lempeng dunia yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat gugusan vulkanik yang memanjang dari Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa (BNPB, 2011).

Salah satu bencana besar yang melanda Indonesia tahun 2010 adalah letusan Gunung Merapi. Bencana ini menyebabkan perekonomian masyarakat terpuruk. Padahal, masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Merapi Merbabu pada umumnya adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka sangat bergantung pada kegiatan pertanian sayur mayur. Bencana ini menyisakan kisah duka yang mendalam bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak bencana, khususnya di lereng Gunung Merapi Merbabu. Tidak hanya karena kehilangan anggota keluarga serta trauma pasca bencana, tetapi juga karena mereka kehilangan harta benda dan pekerjaan mereka terutama sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama masyarakat di sana.

Di sisi lain, dampak letusan Gunung Merapi membuat lahan pertanian menjadi semakin subur. Sehingga setelah bencana masyarakat ingin kembali mendapatkan penghidupan dengan mulai mengolah lahan pertanian yang

mereka miliki. Namun hal tersebut terkendala oleh keterbatasan modal. Hal ini menyebabkan masyarakat membutuhkan bantuan permodalan. Sayangnya, akses masyarakat terhadap perbankan di Indonesia masih sangat rendah. Data Bank Dunia (2009) terkait akses masyarakat terhadap layanan keuangan di Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 40 persen masyarakat Indonesia yang tidak dapat mengakses layanan kredit dari penyedia jasa keuangan dan hanya sekitar 20 persen penduduk Indonesia yang kemudian mendapatkan pinjaman dari bank.

Data ini semakin memperkuat premis bahwa bank tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin. Bank dan lembaga keuangan mikro adalah entitas komersial hanya berorientasi pada keuntungan. Demi menjaga keamanan dan kesinambungan keuangan, bank hanya memilih calon nasabah yang mampu mengembalikan uang dan mampu menghasilkan pendapatan bagi bank. Padahal bank adalah motor penggerak perekonomian masyarakat melalui pemberian pinjaman usaha. Tujuan suci bank memudar, ketika industri perbankan membengkak. Pemahaman ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, memaksa bank untuk berorientasi hanya pada keuntungan. Dampaknya, Bank Cenderung selektif dalam menyalurkan kredit.

Adanya sistem selektivitas yang ketat dalam menyalurkan kredit perbankan telah menyebabkan usaha mikro / masyarakat miskin tidak dapat dilayani. Pada saat yang sama mereka juga tidak memiliki aset yang bisa dijadikan jaminan. Karena tidak memenuhi kelayakan, sulit bagi mereka untuk dapat mengakses kredit perbankan. Masyarakat tanpa keamanan finansial ini berasal dari kalangan ekonomi kelas bawah. Mereka tinggal di pedesaan atau hidup di kantong-kantong kemiskinan perkotaan. Dampak semua ini adalah banyaknya orang yang terjebak pada pinjaman rentenir dengan bunga yang sangat tinggi.

Alih-alih untuk membantu, pinjaman-pinjaman tersebut sebenarnya malah memperburuk kondisi ekonomi masyarakat. Dalam data survei Bank Dunia yang dikemukakan di atas juga menampilkan bahwa sekitar 40 persen masyarakat miskin terpaksa mengakses layanan keuangan informal dan semi formal, termasuk bank keliling atau rentenir (Juwaini dalam Satrio & Yuni, 2014).

Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal dan aset, pinjaman tanpa bunga sangat diharapkan. Namun, hampir tidak mungkin lembaga keuangan mengucurkan pinjaman tanpa bunga. Meskipun praktek semacam itu masih diperlukan di suatu negara yang mayoritas penghuninya dari para penduduk yang tidak mampu mengakses bank dengan tingkat persaingan yang tinggi antara perbankan Islam dan perbankan konvensional sebagaimana yang terjadi di Indonesia (Wulandari & Subagio, 2015).

Pinjaman tanpa bunga bertujuan untuk membangkitkan kemandirian masyarakat. Jenis pembiayaan ini harus benar-benar didasarkan pada jiwa penolong yang sejati. Dalam istilah ekonomi Islam, kredit bernilai ini disebut *Qardhul Hasan* (pinjaman yang baik) yang merupakan kegiatan meminjam tanpa tambahan keuntungan. Praktek-praktek seperti inilah yang sangat diperlukan bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan yang akut, atau yang tengah terdampak bencana, atau yang berniat memulai kegiatan bisnis untuk pertama kalinya.

Pinjaman didalam bahasa arab disebut *Ariyah*, yang artinya membolehkan atau mengizinkan untuk memanfaatkan suatu barang kepada orang lain dengan ijin pemiliknya dan sang peminjam harus tetap menjaga keutuhan barang itu. Menurut pendapat ulama *Ariyah* adalah suatu hak untuk memanfaatkan barang atau harta yang diterimanya dari orang lain tanpa memberikan imbalan asalkan barang atau harta yang dipinjam tersebut dikembalikan secara utuh pada saat pengembaliannya. Adapun hal yang menyangkut *Ariyah* atau pinjaman disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2 Allah swt berfirman :

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS Al Maidah : 2)

Dalam ayat tersebut Allah swt memerintahkan Umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Seperti halnya memberi pinjaman kepada seseorang yang membutuhkan dan melarang untuk tolong-menolong dalam keburukan seperti Riba. Memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan termasuk akhlak mulia dan hal ini membantu orang yang sedang tertimpa kesulitan. Sebagaimana Rasulullah saw bersabda :

“Barangsiapa yang melepaskan kesusahan seorang Mu”min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat (H.R. Muslim)

Hal ini juga menjadi masalah bagi masyarakat sekitar Merapi Merbabu hingga saat ini. Karena keterbatasan yang dimiliki, sementara kehidupan harus terus berlanjut, mereka pada akhirnya terjat dalam pinjaman rentenir demi mendapatkan sebuah modal pinjaman. Pengetahuan mereka tentang dunia pinjam meminjam sangat rendah sehingga menyebabkan mereka hidup dalam riba selama bertahun-tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN hadir di tengah-tengah masyarakat melalui Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu dengan mencanangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat berupa pinjaman modal pertanian tanpa

riba. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk meningkatkan kondisi perekonomian pasca bencana.

Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif dan Kualitatif. Desain penelitian ini adalah cross sectional, yang merupakan pengumpulan data (yang juga salah satu metode penelitian deskriptif) dimana informasi yang dikumpulkan hanya pada suatu tertentu waktu (Kountur, 2003). Penelitian ini dilakukan di Desa Windusajan , Sawangan, Magelang, Jawa Tengah. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja karena wilayah ini merupakan wilayah penerima Program Pemberdayaan Ekonomi Umat “Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba”. Pengumpulan data dilakukan pada Maret 2019.

Populasi penelitian adalah seluruh stakeholders yang terlibat dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Umat “Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba”, yang terdiri dari Penerima Program, Kepala Desa, dan Pengelola Program yang terdiri dari Pengurus Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu sebagai Koordinator Program dan Fasilitator.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Kepala Desa Windusajan yang terdiri dari 1 (satu) orang, Koordinator Program berjumlah 1 (satu) orang, 9 Fasilitator, Penerima Program yang sampai dengan tahun 2019 berjumlah 83 orang dari populasi 500 orang. Penarikan contoh menggunakan rumus Slovin, jumlah sampel dari total 500 Penerima Manfaat sebanyak 83 responden dengan tingkat kepercayaan 90%. Kemudian dipilih 83 responden dengan menggunakan metode random sampling. Perhitungan sampel penelitian adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{500}{1 + (500 \times 10\%^2)} = 83$$

Pada penelitian ini, jumlah responden yang diwawancarai adalah 85 orang, jumlah yang melebihi jumlah batas perhitungan sampel berdasarkan rumus Slovin. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dengan pengisian kuisioner, wawancara, wawancara mendalam, dan FGD. Wawancara diajukan kepada Penerima Program, sedangkan Wawancara mendalam diajukan kepada Kepala Desa, Koordinator Program, dan salah satu perwakilan dari fasilitator. Sementara itu, FGD diadakan bersama 9 Fasilitator.

Data yang diperoleh akan diolah melalui proses editing, coding, scoring, cleaning, dan analisis data. Data akan dianalisis dengan menggunakan

3 metode yaitu: analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel dalam penelitian ini, yang terdiri dari profil program, profil wilayah, dan profil penerima manfaat. Analisis kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengukur kepuasan penerima manfaat dan menganalisis dampak program.

Pengukuran kepuasan penerima manfaat program “Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba” menggunakan rentang nilai 0 (nol) – 3 (tiga). Sedangkan kisaran nilai kepuasan dibagi sebagai berikut pada Tabel 1.

Tabel 1. Rentang Kepuasan Penerima Manfaat

Nilai	Informasi
75,1% - 100%	Sangat Puas
50,1% – 75%	Puas
25,1% - 50%	Kurang Puas
0% – 25%	Tidak Puas

Evaluasi dampak program dalam studi ini diukur dengan beberapa metode, yaitu:

1. Most Significant Change (MSC). Metode memerhatikan langkah-langkah perubahan yang tampak paling signifikan dari sebelum dan setelah program. Perubahan paling signifikan adalah instrumen pelengkap dalam mengungkap perubahan yang paling berpengaruh dan dikenal di masyarakat. Hasil dari penggunaan metode ini adalah suatu kisah perubahan yang murni dirasakan dan disepakati oleh masyarakat sebagai perubahan paling besar.
2. Penilaian Dampak Mata Pencaharian Berkelanjutan (Ashley & Hussein, 2000). Metode ini mengukur pengaruh program pada 5 (lima) aspek. 5 (lima) aspek yang akan diukur dalam ini studi adalah: Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Dakwah, Aspek Spiritual, dan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membandingkan data pra dan pasca pelaksanaan program. Rentang nilai yang digunakan adalah 0-5 dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 2. Skala Penilaian Metode SLIA

SKALA LIKERT 0 - 5	
Nilai	Informasi
0	Tidak Ada
1	Sedikit Sekali
2	Sedikit
3	Cukup
4	Bagus
5	Sangat Bagus

Sedangkan rentang nilai perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah program adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rentang Perubahan Nilai dalam Penilaian SLIA

Nilai	Informasi
0.00 – 0.49	Permanen
0.50 – 1.49	Tinggi
1.50 – 2.99	Sangat Tinggi
3.00 – 5.00	Ekstrim

LANDASAN TEORI

Kata kepuasan (*satisfaction*) berasal dari bahasa Latin *satis* (artinya cukup baik, memadai) dan *facio / facere* (melakukan atau membuat). Jadi secara etimologis, kepuasan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memenuhi sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Namun, dari perspektif perilaku pelanggan, istilah kepuasan pelanggan menjadi kompleks. Bahkan saat ini belum ada kesepakatan di konsep dari pelanggan kepuasan, apakah kepuasan adalah respon emosional atau evaluasi kognitif (Tjiptono, 2014).

Kepuasan pelanggan dapat dinyatakan setelah pelanggan menikmati layanan / produk yang dimaksud. Kepuasan pelanggan merupakan respon

emosional terhadap evaluasi pengalaman mengkonsumsi suatu produk / jasa. Menurut Engel, Blackwell, & Miniard (1994). Kepuasan pelanggan adalah tanggapan yang efektif terhadap pengalaman mengonsumsi atau mengevaluasi kesesuaian atau perbedaan yang dirasakan antara harapan sebelum konsumsi atau penggunaan dengan kinerja produk yang sebenarnya setelah konsumsi atau penggunaan.

Kepuasan pelanggan merupakan strategi jangka panjang yang membutuhkan komitmen, dari segi sumber pendanaan maupun sumber daya manusia. Hal ini dirasakan sangat mendesak karena pelanggan akan merekomendasikan kepada pelanggan potensial suatu fungsi yang memuaskan berdasarkan pengalaman mereka. Lebih lanjut menurut Fornell (1992) kepuasan pelanggan akan mempengaruhi perilaku membeli, dimana pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan setia.

Anderson, Fornell, dan Lehman (1994) menyatakan bahwa jika pelanggan merasa puas dengan barang atau jasa yang diterima maka akan menimbulkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang setia akan setia kepada perusahaan. Dengan loyalitas pelanggan ke dalam produk atau layanan akan membuat pelanggan kembali bertransaksi di masa depan.

Sementara itu, pada program pemberdayaan masyarakat ini, pengukuran kepuasan penerima bertujuan untuk menentukan sejauh mana kualitas program dirasakan oleh penerima program. Sehingga hasil pengukuran ini dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas program.

Adapun terkait pemberdayaan masyarakat, yaitu: a. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuasaan kepada pihak yang tidak berdaya untuk memiliki kekuasaan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri; b. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya tentang aspek ekonomi; c. Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program atau proses; d. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat; e. Konsep pemberdayaan masyarakat termasuk pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. (Prajino dan Pranaka 1996)

Suharto (2005) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memperoleh kebebasan, dalam arti tidak hanya bebas untuk mengungkapkan pendapat, tetapi bebas dari kelaparan, bebas dari ketidaktahuan, bebas dari rasa sakit; (b) mencapai sumber daya produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan; (c) berpartisipasi dalam proses

pengembangan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Tujuan pemberdayaan dapat menjadi individu atau kolektif. Ife (1995) menyatakan bahwa kelompok lemah yang perlu diberdayakan adalah mereka yang termasuk dalam kelompok: (1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah dalam kelas, jenis kelamin, dan etnis. Contoh yang termasuk dalam kategori lemah adalah buruk secara struktural; (2) Kelompok lemah khusus, seperti lansia, anak-anak dan remaja, penyandang disabilitas, gay, lesbian, dan komunitas terasing; (3) Kelompok lemah pribadi, yaitu mereka yang mengalami masalah pribadi dan / atau keluarga. Sennet dan Cabb (Suharto 2005) dan Conway (Suharto 2005) menyatakan bahwa ketidakberdayaan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kurangnya keamanan ekonomi, kurangnya pengalaman di arena politik, kurangnya akses informasi, kurangnya dukungan finansial, kurangnya pelatihan, dan ketegangan fisik dan emosional.

Menurut Ife (1995) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: (1) pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan; (2) pemberdayaan dengan melakukan aksi sosial dan politik; (3) pemberdayaan melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan dilakukan dengan membangun atau mengubah struktur dan kelembagaan yang memungkinkan kelompok lemah untuk mengakses sumber daya atau layanan, sehingga membuka peluang bagi kelompok lemah untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Evaluasi dampak merupakan salah satu pola perbaikan terpenting dalam proses program. Maka dari itu diperlukan mekanisme evaluasi yang komprehensif dengan cara yang komprehensif pula. Instrumen evaluasi yang sesuai ini akan memberikan kesempatan untuk memperoleh informasi dan data yang akurat dan valid. Dengan demikian, proses kesimpulan sebagai rekomendasi penyusunan program rencana tindak lanjut akan sesuai dengan tujuan program. Kelsey dan Hearne (1955) dalam buku profil SDP 2013 menyatakan bahwa evaluasi sebagai Cooperative Extension berarti proses untuk menentukan nilai suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain evaluasi menjadi suatu metode untuk mengetahui sejauh mana suatu kegiatan berkembang dan mengarah pada pencapaian tujuan.

Rogers (2003) menyatakan bahwa efektivitas adalah tingkat kemampuan suatu program untuk mencapai tujuannya. Boyle (1981) telah menguraikan beberapa standar efektivitas berdasarkan jenis program. Efektivitas program pembangunan (perkembangan) diukur dari: (1) kualitas solusi bagi masalah yang dihadapi; dan (2) tingkat kemampuan individu, kelompok atau komunitas untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Efektivitas program yang bersifat kelembagaan diukur dari: (1)

kompetensi yang dimiliki; dan (2) penilaian konsumen atau pihak yang memanfaatkan. Efektivitas dari program yang informatif diukur dari: (1) keterjangkauan program; dan (2) seberapa banyak informasi disebarkan.

Evaluasi dampak program dapat secara diukur dengan beberapa metode, yaitu: (1) Cara SLIA (Sustainable Livelihood Impact Assesment) (Ashley & Hussein, 2000). Metode ini mengukur pengaruh program pada berbagai aspek (Alam, Ekonomi, Sosial, Manusia, Spiritual, dan Fisik) dengan membandingkan data pra dan pasca pelaksanaan program. (2) Most Significant Change (MSC). Metode ini mengukur langkah-langkah perubahan yang terlihat paling signifikan dari sebelum dan setelah program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Umat: "Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba". Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN merupakan salah satu lembaga pengelola ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). YBM PLN memiliki visi menjadi lembaga pengelola zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) terkemuka yang amanah, profesional, dan transparan di lingkungan PT PLN (Persero) dalam memberdayakan mustahik menjadi muzakki. Sampai saat ini, YBM PLN memiliki kepedulian terhadap masalah dari kemiskinan di Indonesia, salah satu bentuk kepedulian itu adalah peluncuran Program Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam bentuk Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba melalui Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. YBM PLN melihat bahwa masyarakat sekitar Merapi Merbabu merupakan masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi pasca bencana yang mereka hadapi.

Baitul-Maal menerima dan menyalurkan zakat, sedekah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya (Hilman, 2016). BMT di Indonesia telah menerapkan sistem pengendalian internal untuk kegiatan pembiayaannya. Peringkat implementasi adalah: informasi dan komunikasi; pemantauan; lingkungan pengendalian; tugas beresiko; dan aktivitas pengendalian (Wardiwiyono, 2012). Prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam sistem, mekanisme, dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah suatu nilai tambah untuk masyarakat, yang tidak ditemukan pada perbankan konvensional. Kinerja keuangan perbankan syariah yang tinggi melebihi pesaingnya menunjukkan potensi yang signifikan untuk tumbuh pesat di Indonesia masa depan (Said, 2015). Pendirian pasar modal syariah adalah tugas bersama untuk memperbaiki, bahkan menata kembali dengan sekuritas yang baik, saham syariah, di pasar modal agar sesuai dengan prinsip syariah yang riil, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat (Astuty 2015).

Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu merupakan salah satu

pesantren yang berada di sekitar lereng Gunung Merapi Merbabu. Pesantren ini berdiri setelah meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010. Pesantren ini tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga mempunyai program di bidang ekonomi, sosial dan dakwah. Pada tahun 2013, Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu menggulirkan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat “ Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba”.

Program ini merupakan program yang lahir dari kelompok pengajian di pesantren. Kelompok pengajian mencari donatur dan kemudian dialokasikan menjadi program. Namun program ini belum bisa diakses oleh semua masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal usaha di sekitar lereng Merapi Merbabu karena keterbatasan dana yang hanya Rp 5 juta. Hingga akhirnya, YBM PLN hadir dengan memberikan bantuan modal.

Awalnya, pada 2013, YBM PLN memberikan hibah kepada masyarakat melalui Pesantren Komunitas Merapi Merbabu, yang berjumlah ke Rp 30 juta. Namun pada 2014, dana bantuan ditambah hingga Rp 100 juta dan kemudian pada 2018 ditambah lagi Rp 100 juta. Hal ini dikarenakan YBM PLN melihat antusias masyarakat yang tinggi dan pengelolaan yang baik terhadap program ini. Data dana hibah yang diberikan oleh YBM PLN dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hibah YBM PLN untuk Program Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba Setiap Tahun

No	Tahun	Besaran Dana Hibah
1	2013	Rp 30.000.000
2	2014	Rp 100.000.000
3	2018	Rp 100.000.000

Awalnya program ini hanya ditujukan sebagai pinjaman modal usaha kepada petani di sekitaran gunung Merapi Merbabu. Namun seiring berjalannya waktu, program ini juga turut diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan spiritual masyarakat. Selepas bencana, tidak hanya kerugian materil yang masyarakat derita, tetapi juga kerugian non materil, salah satunya trauma. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat membutuhkan dukungan moril terutama motivasi untuk bangkit kembali.

Tujuan program Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Memutus mata rantai riba yang menjerat masyarakat.

2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aturan pinjam meminjam dalam Islam.
3. Melatih masyarakat untuk menginvestasikan uang dan non-uang (tanaman).
4. Meningkatkan spiritual masyarakat terutama dalam hal wajib ibadah dan sunnah.
5. Memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat.

Pada permulaan peluncuran program ini oleh Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu, dengan modal dari donatur hanya Rp 5 juta, bantuan yang diberikan adalah dalam bentuk bibit tanaman. Namun setelah evaluasi, ditambah dengan adanya pencairan dana hibah dari YBM PLN, program ini akhirnya diubah menjadi pinjaman modal bergulir. Setiap Kepala Keluarga (KK) diberikan pinjaman modal tanpa riba dari Rp 500 ribu yang dapat menjadi digunakan untuk membeli bahan pertanian, seperti bibit, pupuk, dan lain-lain. Pinjaman ini adalah pinjaman bergulir. Setiap Penerima KK yang diberikan 4 (empat) bulan untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga 0 (nol) persen / tanpa riba. Kemudian perputaran uang ini dialokasikan kembali ke masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman lebih dari 1 (satu) kali. Selain pinjaman modal usaha, ini Program ini juga disediakan di dalam bentuk pendampingan yaitu: studi rutin islami, studi banding, pembinaan kelompok tani.

Pada awal terbentuknya, Program Pemberdayaan Ekonomi Umat “Pertanian Modal Pinjaman Tanpa Riba” berjalan seperti itu. Program ini hanya disosialisasikan melalui kegiatan di pesantren. Program ini juga terbuka bagi siapa saja yang ingin mengajukan pinjaman. Namun sejak tahun 2015 Pesantren mulai melakukan pembenahan dalam pengelolaan program. Program diawali dengan sosialisasi kepada aparat desa terkait untuk mendapatkan dukungan. Setelah itu, pesantren dalam hal ini koordinatornya membentuk tim fasilitator. Tim Fasilitator bertugas mempublikasikan program dan memilih Penerima Manfaat di desa / RT masing-masing. Ini karena Fasilitator adalah orang-orang yang paling mengenal masyarakat di daerahnya. Setelah itu, Fasilitator melakukan pendataan dan penilaian kepada Penerima Manfaat. Penilaian singkat dilakukan untuk melihat kelayakan Penerima Manfaat.

Selanjutnya Penerima ditentukan oleh Pengelola / Koordinator Program. Penerima Manfaat menandatangani perjanjian pengembalian dana. Pada hari yang sama, dana segera dicairkan dan Penerima Manfaat dapat menggunakan dana pinjaman untuk modal pertanian mereka. Setelah 4 (empat) bulan, Penerima harus mengembalikan modal yang dipinjam untuk digulirkan kembali. Maksimal 1 (satu) minggu sebelum tanggal jatuh tempo

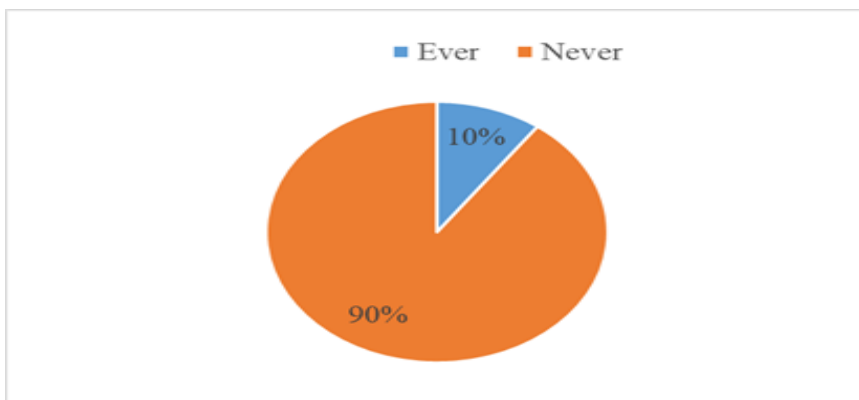
pengembalian, petugas lapangan akan memberikan peringatan kepada Penerima Manfaat agar tidak terlambat dalam mengembalikan pinjaman.

Pada saat pengembalian modal, Penerima diberi kesempatan untuk meminjam kembali. Apabila Penerima ingin meminjam lagi, maka Fasilitator akan melakukan evaluasi untuk penetapan lebih lanjut atau tidak. Namun jika Penerima Manfaat tidak mau mengajukan pinjaman lagi, proses sudah selesai, tapi yang bersangkutan boleh mendaftar lagi pada periode berikutnya.

Pengukuran Kepuasan Penerima Manfaat

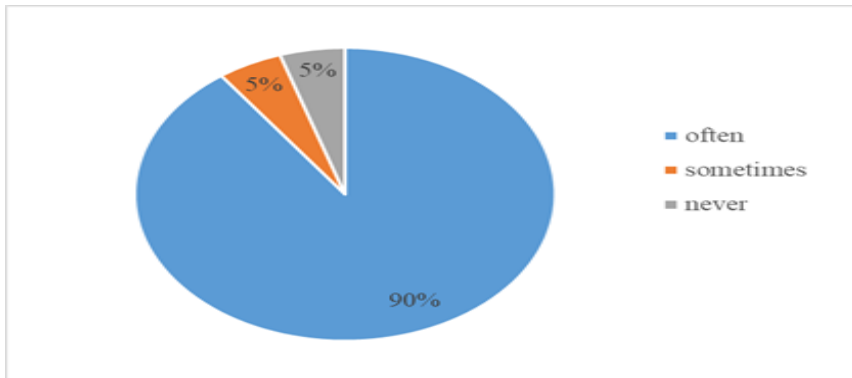
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 10% Penerima Manfaat yang mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman. Ini karena Penerima tidak memiliki cukup uang untuk dikembalikan. Namun keterlambatan tersebut selalu diberitahukan oleh Penerima kepada Fasilitator Lapangan. Hasil wawancara independen menunjukkan bahwa hanya ada 1 (satu) Penerima yang 'menghilang' / tidak ada kabar saat diminta mengembalikan pinjaman.

Gambar 2. Keterlambatan Pengembalian Pinjaman



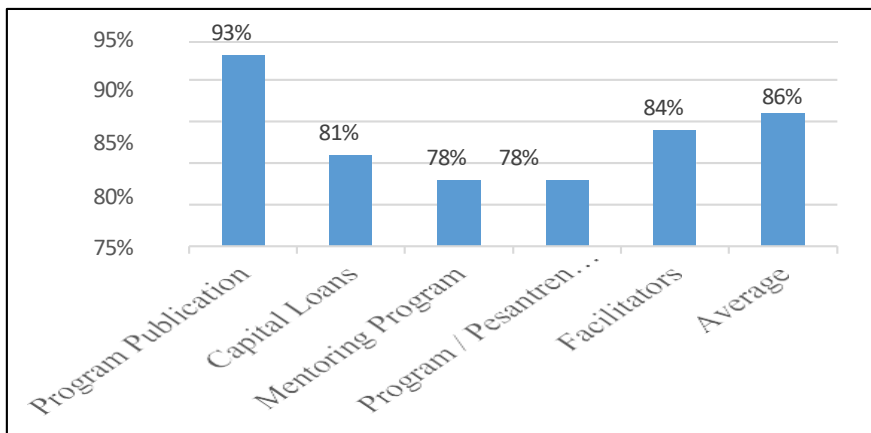
Pengajian di Pesantren adalah serangkaian pra program yang dibuat oleh pengurus. Melalui pengajian ini, informasi tentang program disosialisasikan. Setelah program berjalan, pengajian merupakan salah satu bentuk program bantuan yang diberikan oleh penyelenggara program kepada Penerima Manfaat. Melalui pengajian ini materi tentang program (riba, infaq, dll) diberikan oleh pengelola program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 90% Penerima Manfaat sering menghadiri pengajian.

Gambar 3. Intensitas dalam Mengikuti Bantuan / Pengajian di Pesantren



Kepuasan Penerima Manfaat terhadap Program “ Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba” dalam penelitian ini dinilai melalui 5 (lima) variabel, yaitu: (1) Publikasi Program, (2) Pinjaman Modal, (3) Program Mentoring, (4) Koordinator Program / Pesantren M3, dan (5) Fasilitator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor kepuasan pada semua variabel berada pada kategori sangat puas. Hal ini menunjukkan bahwa Penerima Manfaat sangat puas dengan program “Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba” yang mereka terima.

Gambar 4. Skor Kepuasan Penerima Program



Tabel diatas ini menunjukkan bahwa skor kepuasan Penerima Manfaat tertinggi ada pada Indikator Fasilitas dalam Mengakses Program (100%). Sistem pinjaman yang disediakan oleh Manajer Program dengan hanya mendaftarkan, penilaian singkat, dan menandatangani kontrak, pengembalian

tanpa persyaratan administrasi yang rumit dirasakan oleh Penerima sangat baik. Hal ini karena para Penerima adalah dari kalangan ekonomi rendah, dengan tingkat Pendidikan yang juga rendah, sehingga banyaknya persyaratan administrasi adalah faktor yang membuat Penerima Manfaat sulit untuk mengakses program tersebut.

Sedangkan skor kepuasan terendah terdapat pada indikator Jumlah Dana Peminjaman (69,9%) dan Periode Pengembalian Pinjaman (63,1%). Penerima manfaat merasa bahwa jumlah dana dan jangka waktu pengembalian perlu ditambah karena usaha pertanian membutuhkan modal yang besar.

Tabel 5. Skor Kepuasan Penerima Program berdasarkan Indikator

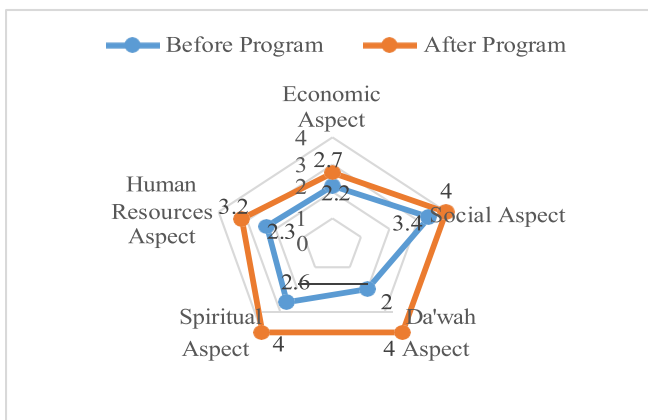
Indikator	Nilai/Skor	Level Kepuasan
Aspek Publikasi Program		
a. Distribusi Publikasi Program	93,0%	Sangat Puas
Aspek Pinjaman Modal		
a. Kemudahan Mengakses Program	100%	Sangat Puas
b. Sistem Pinjaman	89,8%	Sangat Puas
c. Jumlah Pinjaman Dana	69,9%	Puas
d. Sistem Pengembalian Pinjaman	80,4%	Sangat Puas
e. Periode Pengembalian Pinjaman	63,1%	Puas
Aspek Program Pendampingan (Pengajian)		
a. Minat dalam Program Mentoring	78,8%	Sangat Puas
b. Materi disampaikan pada saat Mentoring	77,5%	Sangat Puas
Aspek Koordinator Program / Pesantren M3		
a. Kelancaran Komunikasi dengan Koordinator Program / Pesantren M3	82,6%	Sangat Puas
b. Pelayanan yang diberikan oleh Koordinator Program / Pesantren M3	85,9%	Sangat Puas
Aspek Fasilitator		

a. Kelancaran Komunikasi dengan Fasilitator	85.9%	Sangat Puas
b. Layanan yang diberikan oleh Fasilitator	86,4%	Sangat Puas

Pengukuran Dampak Dengan Metode SLIA

Adapun 5 (lima) aspek yang akan diukur dalam metode penelitian SLIA ini adalah: Aspek Ekonomi, Aspek Sosial, Aspek Dakwah, Aspek Spiritual, dan Aspek Sumber Daya Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada 5 (lima) aspek yang diteliti, namun peningkatan tertinggi ada pada aspek Dakwah Islam dan Aspek Spiritual. Sementara itu, peningkatan terendah ada pada Aspek Ekonomi. Berdasarkan wawancara mendalam dengan administrator dan penerima manfaat dari program ini menunjukkan bahwa jumlah kredit modal disediakan masih rendah sementara modal pertanian memerlukan biaya yang besar sehingga pengaruhnya tidak signifikan pada kondisi ekonomi masyarakat. Namun dengan adanya pinjaman ini masyarakat mulai mengurangi pinjaman modal kepada lintah darat.

Gambar 5. Perubahan Aspek berdasarkan analisis SLIA



Tabel 7. Perubahan Aset SLIA

Type of Aspects	Before Program	After Program	Variant
-----------------	----------------	---------------	---------

Economic Aspect	2,2	2,7	0,5
Social Aspect	3,4	4,0	0,6
Da'wah Aspect	2,0	4,0	2,0
Spiritual Aspect	2,6	4,0	1,4
Human Resources Aspect	<u>2,3</u>	<u>3,2</u>	<u>0,8</u>

Hasil evaluasi terhadap 5 aspek SLIA adalah sebagai berikut:

- Aspek Ekonomi meningkat 0.5
- Aspek Sosial meningkat sebesar 0.6
- Aspek Dakwah meningkat sebesar 2.0
- Aspek Spiritual meningkat 1.4
- Aspek Sumber Daya Manusia meningkat 0.8

Dalam pandangan masyarakat, dengan program "Pinjaman Modal Pertanian tanpa Riba" ini, kesadaran masyarakat akan sikap qonaah / syukur atas apa yang dimiliki mulai muncul. Masyarakat mulai sadar akan infaq dan qurban, karena mereka mendapat pinjaman tanpa bunga. Dengan demikian, uang yang harus digunakan untuk membayar bunga ketika mereka masih meminjam dari rentenir bisa dialokasikan untuk infaq dan Qurban.

Tabel 8. Perubahan Aspek Komponen SLIA

ASPEK	Pra	Pasca	Variasi	Perubahan
Aspek Ekonomi				
a. Peningkatan Pendapatan	2,8	3,0	0,2	Permanen
b. Omset Bisnis Keunangan	2,5	2,7	0,2	Permanen
c. Aset Tabungan	2,5	2,7	0,2	Permanen
d. Menghindari Lintah Darat / Rentenir	1,0	2,5	1,5	Sangat Tinggi

Aspek Sosial				
a. Tingkat Partisipasi Dalam Pengajian Pondok Pesantren	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
b. Kontribusi Kepada Masyarakat	4,0	4,0	0,0	Permanen
c. Interaksi dan Sosialisasi Antar Masyarakat	3,5	4,0	0,5	Tinggi
d. Tingkat Kerentanan Terhadap Konflik Dalam Masyarakat (Keamanan)	4,0	4,0	0,0	Permanen

Aspek Dakwah				
a. Beban Riba sangat memberatkan	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
b. Syiar dakwah Pesantren	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
c. Idealisme Islam dalam pinjam meminjam sangat meringankan	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
d. Idealisme agama Islam itu mudah dan tidak membebani	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
Aspek Spiritual				
a. Kesadaran kebiasaan berinfaq	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
b. Kesadaran kebiasaan berqurban	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
c. Kesadaran menunaikan ibadah di masjid	3,0	4,0	1,0	Tinggi
d. Perilaku bersyukur	3,0	4,0	1,0	Tinggi
d. Kepercayaan dan komitmen akan janji	3,0	4,0	1,0	Tinggi
Aspek Sumber Daya Manusia				
a. Pengetahuan mengenai pinjam meminjam dalam Islam, riba, dan keuangan Islam	2,0	4,0	2,0	Sangat Tinggi
b. Keterampilan membentuk kelompok bisnis	2,0	2,5	0,5	Tinggi
c. Kemampuan manajemen keuangan	3,0	3,0	0,0	Permanen

Pengukuran Dampak Dengan Metode Most Significant Change

Metode ini mengukur perubahan yang dianggap paling signifikan dari sebelum dan sesudah program. Perubahan paling signifikan adalah instrumen pelengkap dalam mengungkapkan perubahan yang paling berpengaruh dan dikenal di masyarakat.

Tabel 9. Perubahan yang Terjadi di Komunitas Sebelum dan Setelah Program

No	Pra Program	Pasca Program
1	Masyarakat meminjam modal usaha dari rentenir / bank keliling	Masyarakat meminjam modal usaha dari program Pinjaman Modal Pertanian tanpa Riba / Bank Islam
2	Partisipasi masyarakat dalam pengajian di Pesantren dan shalat di masjid rendah	Partisipasi masyarakat dalam menghadiri pengajian di Pesantren dan ibadah di masjid meningkat karena Program Pengajian di Pesantren adalah bagian dari Program Mentoring
3	Rendahnya kesadaran akan infaq dan qurban (juga karena sumber daya yang terbatas)	Kesadaran akan infaq dan qurban meningkat karena pendapatan yang semula digunakan untuk membayar bunga / riba kepada rentenir bisa dialokasikan sedikit untuk infaq / qurban
4	Pengetahuan publik tentang bahaya dan hukum riba rendah	Pengetahuan publik tentang bahaya dan hukum riba meningkat
5	Syiar dakwah Islam dan Pesantren Masyarakat agak kurang	Syiar dakwah Islam dan Pesantren Masyarakat Meningkat

KESIMPULAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Umat “Pinjaman Modal Pertanian Tanpa Riba” merupakan salah satu model program untuk menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir / bank keliling yang mematok suku bunga pinjaman tinggi. Dengan adanya program ini maka pengetahuan masyarakat tentang pinjam meminjam dan bahaya riba semakin meningkat. Masyarakat mulai menyadari bahwa riba memberatkan dan YBM PLN melalui Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu telah menawarkan solusi yang cukup meringankan masyarakat.

Prinsip kepercayaan terinvestasi dalam pengelolaan program dengan kehadiran Fasilitator yang mengetahui Penerima Manfaat Program dengan baik, sehingga ini menjadi jaminan dari pengembalian atas pokok pinjaman sehingga dapat diputar kembali. Program ini sejalan dengan tuntunan syariah dalam aplikasi akad “*Qardhul Hasan*”. Adapun hukum dari *qardhul hasan* adalah boleh atau mubah dan disebutkan dasarnya dalam Al-Qur’an dan Hadits berikut ini :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (QS. Al-Baqarah : 245)

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak (QS. Al- Hadid : 11)

“Tidaklah seorang Muslim memberikan pinjaman kepada orang Muslim lainnya sebanyak dua kali pinjaman, melainkan layaknya ia telah menyedekahkan satu kali.”

Dalam suatu hadits disebutkan bahwa pinjaman yang diberikan pada orang yang lebih membutuhkan ternyata lebih utama dibandingkan dengan sedekah.

Aku melihat pada waktu malam di isirakan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas 10 kali lipat dan qardh 18 kali. Aku bertanya: „Wahai Jibril mengapa qardh lebih utama dari sedekah?“ ia menjawab: karena peminta akan minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah)

Masyarakat diberikan kemudahan akses program karena tidak perlu kesulitan dalam mempersiapkan administrasi dan jaminan pinjaman, hal ini menjadi pertanda bahwa Islam itu mudah dan tidak memberatkan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Program ini memiliki dampak yang cukup baik pada masyarakat, terutama dalam aspek Dakwah dan Spiritual, sehingga program ini dapat terus dikembangkan sehingga kegunaannya lebih meluas.

REFERENSI

Anderson, E., Fornell, C, dan Lehman, D.R. (1994). Customer Satisfaction Market Share, and Profitability. *Journal of Marketing*. Vol 58, hlm.53-66

Ashley, C. dan Hussein, K. (2000). *Developing Methodologies for Livelihood Impact Assesment: Experience of the African Wildlife Foundation in East Africa*. ODI Working Paper 129. London: ODI

Astuty, W. (2015). Solusi Luar Biasa untuk Krisis Ekonomi Indonesia: Pasar Modal Syariah. *Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 3 (2), 47-56.

- BNPB. Potensi Ancaman Bencana. (2011). [diunduh 2012 Januari 19]. Tersedia di <http://www.bnpb.go.id/website/asp/content.asp?id=31>.
- Boyle, Patrik.G (1981). *Planning Better Programs*, New York: McGraw-Hill. Book Company
- Enggel, FJ, Blackwell, GR, Miniard, WF (1994). *Perilaku Konsumen (Di Indonesiakan oleh FX Budiyanto Drs.)* Jilid 1 & 2. Binarupa Aksara: Jakarta.
- Fornell, Claes. (1992). A national customer satisfaction barometer : The Swedish Experience. *Journal of Marketing* Hilman, I. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Internasional Bisnis dan Penemuan Manajemen*, 5 (9), 56-66.
- Ife, J. (1995). *Community Development Creating Community Alternatives- Vision, Analysis dan Practice*. Melbourne (AU): Longman
- Kelsey, L.D. and Hearne C.C. (1955). *Cooperative Extension Work* Ithaca. Comstock Publishing Associates Kountur,
- R. (2003). *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis*. Jakarta: PPM
- Said, S. (2015). Kinerja Perbankan Syariah di Makassar. *Jurnal Al-Ulum*, 15 (1), 21-42. Satrio, T. & Yuni, M. (2014). *Dana Perwalian Sosial*. Ciptat: Dompot Dhuafa.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Reflika Aditama. Tjiptono, Fandy. (2014). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wardiyono, S. (2012). Sistem Pengendalian Internal Pembiayaan Mikro Syariah: Kajian Eksplorasi Baitul Maal wat Tamwil di Kota Yogyakarta Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Islam dan Timur Tengah*, 5 (4), 340-352.
- Bank Dunia. (2009). *Meningkatkan akses layanan keuangan di Indonesia Vol. 2. Ringkasan Eksekutif*. Makalah Kerja 52032, Washington, DC: Bank Dunia.
- Wulandari, D. & Subagio, A. (2015). Pengambilan Kputusan Konsumen pada Bank Konvensional dan Bank Syariah berdasarkan Persepsi Kualitas Layanan. *Procedia-Ilmu Sosial dan Perilaku*, 211, 471-475.